

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TA 2025**

**DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, maka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 dan menjadi acuan segenap satuan kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini disusun untuk menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun yang akan datang serta sebagai dokumen perencanaan jangka pendek (Tahunan) untuk mensukseskan program-program yang telah direncanakan.

Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data-data dan masukan sehingga RENJA Perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Demikian, semoga dokumen RENJA Perubahan ini dapat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahun ke depan.

Palembang, 3 November 2025

Kepala Dinas,


Dr. Ir. H. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196703151990031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	7
I.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.3.1 Maksud	10
1.3.2. Tujuan	11
I.4. Sistematika Penulisan	12
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	49

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.....	52
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
4.1 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	56
4.2 Program dan Kegiatan Tahun 2025	61
V. PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Target dan Realisasi Tertib Administrasi dan Kepemerintahan Tahun 2022 dan Tahun 2023	16
Tabel II.2	Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Obat	18
Tabel II.3	Realisasi Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Obat Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	19
Tabel II.4	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.....	22
Tabel II.5	Indeks Pertanaman Tanaman Padi di Sumatera Selatan.....	37
Tabel II.6	Luas Baku Sawah, LP2B dan IP Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan	38
Tabel III.1	Isu-isu strategis di Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan	51
Tabel III.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2030 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	53
Tabel T-C.31	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan.....	42
Tabel T-C.32	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumatera memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mencakup berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Pertanian di Pulau Sumatera memiliki peran penting dalam perekonomian, didominasi oleh tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kelapa. Selain itu, tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi kayu juga menjadi komoditas penting. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara keseluruhan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di berbagai provinsi di Sumatera.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat Dinas Pertanian TPH adalah dinas yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, termasuk penyuluhan. Dinas ini juga bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang tersebut.

Dinas Pertanian TPH adalah Perangkat Daerah atau Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu salah satu tugas Perangkat Daerah adalah membuat Rencana Kerja atau Renja.

Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Laporan evaluasi hasil rencana kerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi hasil evaluasi dari rencana kerja yang telah disusun oleh Perangkat Daerah selama satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk

menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Daerah pada tahun 2023 memulai penyusunan rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045 sesuai dengan yang tercantum dalam RKPD 2023, karena pada tahun 2024 Pemerintah Daerah akan melaksanakan Musrenbang RPJPD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 11 ayat (4), Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode yang sedang berjalan. Periode RPJPD yang sedang berjalan berakhir pada tahun 2025. RPJPD yang sudah disusun pada tahun 2023, dapat menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030.

Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi pembantu Gubernur pada tahun 2024 telah menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2025. Namun dengan berjalannya waktu terdapat beberapa perubahan pada anggaran dan untuk menselaraskan dengan program yang terdapat pada Rencana Strategis maka Rencana Kerja Dinas Pertanian TPH mengalami perubahan. Renja Perubahan Dinas Pertanian TPH menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Dinas selama tahun 2025 dan merupakan dokumen rencana pembangunan Pertanian yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada rancangan awal RKPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, Renstra 2025-2029 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan serta usulan dari masyarakat. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Visi Kementerian Pertanian adalah ***“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia,”*** menuju Indonesia Emas 2045. Kolaborasi yang baik dan solid Kementerian Pertanian merupakan gerbang utama untuk membawa Indonesia menggapai kedaulatan pangan. Dalam tataran implementasi, konsep kedaulatan tersebut meliputi segala aspek di dalam sistem pangan, mulai dari aspek atau subsistem penguasaan tanah (reforma agraria), model produksi (agroekologi), pengolahan dan penyimpanan (cadangan pangan), distribusi (tata niaga), konsumsi hingga kelembagaannya.

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Kegiatan perencanaan merupakan titik awal dalam menentukan keberhasilan dari sebuah pelaksanaan misi organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah dituntut agar dapat membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang jelas dan terukur dalam melakukan setiap kegiatan pembangunan. Dokumen Renja-SKPD tersebut merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pengusulan kegiatan dan anggaran penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan Renja Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk 1 (satu) tahun ke depan (Tahun 2025). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan pertanian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Oleh karena itu, dokumen Perubahan Renja ini sudah sepatutnya dijadikan acuan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2025 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan bersinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja

sehingga akuntabilitas pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi pada tahun tersebut. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja ini juga demi menyelaraskan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2025-2030 **“Sumsel Maju Terus untuk Semua”** dengan 7 (Tujuh) Misi. Dinas Pertanian TPH sesuai dengan Tugas dan Fungsi Pokoknya mengakomodir **Misi Kedua** yaitu ***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berkelanjutan dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*** serta **Misi Kedua**, yaitu ***Mewujudkan Keterkaitan (Nexus) antara Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim.***

Tahun 2025 pembangunan pertanian di Sumatera Selatan juga masih mengakomodir optimasi lahan rawa dan cetak sawah. Optimasi lahan rawa dan cetak sawah merupakan program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan luas area pertanian dan produktivitas tanaman pangan. Program ini juga diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan nasional yang merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025 - 2029 serta sebagai evaluasi dari pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dari urusan Pertanian.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
26. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 dapat tercapai.
2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan di sektor pertanian dan kehutanan.
4. Menjadikan kerangka dasar dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan antara rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dengan rancangan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Acuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan pertanian dalam arti luas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2025.
3. Acuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan terhadap target pencapaian yang tertuang pada rancangan Renstra Perubahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi Landasan Hukum di dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.3.1. Maksud

1.3.2. Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKP

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dalam satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan perubahan yang perlu dilakukan dari rencana awal. Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Evaluasi kinerja untuk pelaksanaan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra adalah sebagai umpan balik (*Feed Back*) kinerja yang telah dilaksanakan guna untuk mendorong adanya produktivitas kinerja di masa yang akan datang.

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun yang lalu dan

membandingkan dengan capaian sesuai target jangka menengah.

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Adapun capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tertib Administrasi dan Tata Pemerintahan

Pencapaian sasaran tertib administrasi dan tata pemerintahan pada tahun 2022 dan tahun 2023 dilaksanakan melalui 7 indikator sasaran pada Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1. Target dan Realisasi Tertib Administrasi dan Pemerintahan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	%	100	100	100	100	92,80	92,80
2.	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	%	100	100	100	99,98	96,40	96,40
3.	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	%	100	100	100	100	99,62	99,62
4.	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	%	100	100	100	100	5,12	5,12

5.	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	%	100	100	100	100	75,44	75,44
6.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	%	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	%	100	100	100	100	98,01	98,01
8.	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%	-	-	-	100	93,45	93,45

Untuk tahun 2022 pencapaian untuk sasaran tertib administrasi dan tata pemerintahan tercapai 100% melalui 7 (tujuh) indikator kinerja sedangkan untuk tahun 2023 terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dan pencapaian untuk sasaran tertib administrasi dan tata pemerintahan hanya mencapai 82,60% hal ini dikarenakan pada tahun 2023 ada beberapa kegiatan yang belum dibayarkan sehingga menjadi hutang yang akan dibayarkan pada tahun 2024 dan TPP Bulan Desember 2023 tidak dibayarkan.

1. Produksi dan Produktivitas Tanaman Strategis

Capaian produksi tanaman pangan tahun 2022-2023 berfokus pada peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan. Kegiatan ini menjadi terobosan dalam rangka mendukung mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Tabel II.2 Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Obat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
TANAMAN PANGAN					
1.	Padi				
	Produksi	Ton	3.943.061	2.832.774	71,84
	Produktivitas	Ku/Ha	50,76	56,19	110,7
2.	Jagung				
	Produksi	Ton	963.375	826.836,19	85,83
	Produktivitas	Ku/Ha	65,11	62,36	95,78
3.	Kedelai				
	Produksi	Ton	2.909	48,79	(2.860,21)
	Produktivitas	Ku/Ha	12,38	14,65	2,27
TANAMAN HORTIKULTURA					
1.	Jeruk Siam				
	Produksi	Ton	53.517	42.958	80,27
	Produktivitas	Ku/Ha	531,80	37,27	7,01
2.	Durian				
	Produksi	Ton	30.395	39.671	130,52
	Produktivitas	Ku/Ha	67,74	9,70	(14,32)
3.	Duku				
	Produksi	Ton	49.880	15.326	69,27
	Produktivitas	Ku/Ha	124,40	6,79	94,54
4.	Nanas				
	Produksi	Ton	138.412	477.430	244,93
	Produktivitas	Ku/Ha	693,80	258,75	62,70
5.	Cabai				
	Produksi	Ton	24.303	15.270	62,83
	Produktivitas	Ku/Ha	50,79	4,59	9,04
6.	Bawang Merah				
	Produksi	Ton	710	1.197	168,59
	Produktivitas	Ku/Ha	56,44	7,28	12,90
TANAMAN OBAT					
	Produksi Tanaman Obat	Ton	3.122	6.358	203,65

Tabel II.3. Realisasi Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Obat Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih
			2022	2023	
TANAMAN PANGAN					
1.	Padi				
	Produksi	Ton	2.775.069	2.832.774	57.705
	Produktivitas	Ku/Ha	54,06	56,19	2,13
2.	Jagung				
	Produksi	Ton	1.012.791,35	826.836,19	(185.955,16)
	Produktivitas	Ku/Ha	71,05	62,36	(8,69)
3.	Kedelai				
	Produksi	Ton	392	48,79	(343,21)
	Produktivitas	Ku/Ha	15,14	14,65	(0,49)
TANAMAN HORTIKULTURA					
1.	Jeruk Siam				
	Produksi	Ton	44.468	42.958	(1.510)
	Produktivitas	Ku/Ha	36,17	37,27	1,1
2.	Durian				
	Produksi	Ton	40.615	39.671	(944)
	Produktivitas	Ku/Ha	10,94	9,70	(1,24)
3.	Duku				
	Produksi	Ton	17.573	15.326	(2.247)
	Produktivitas	Ku/Ha	9,03	6,79	(2,24)
4.	Nanas				
	Produksi	Ton	567.120	477.430	(89.690)
	Produktivitas	Ku/Ha	321,85	258,75	(63,1)
5.	Cabai				
	Produksi	Ton	25.497	15.270	(10.227)
	Produktivitas	Ku/Ha	5,68	4,59	(1,09)
6.	Bawang Merah				
	Produksi	Ton	1.130	1.197	67
	Produktivitas	Ku/Ha	6,28	7,28	1
TANAMAN OBAT					
	Produksi Tanaman Obat	Ton	4.895	6.358	1.463

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi masih belum optimal. Melihat kondisi tersebut di atas maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat dan provinsi dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Adapun tujuannya, antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan produksi tanaman pangan berkelanjutan.
2. Meningkatkan ketersediaan produksi hortikultura berkelanjutan.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, antara lain:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan strategis.
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas hortikultura.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung swasembada pangan dan Visi/Misi Gubernur Terpilih Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel II.4 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MISI II : Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berkelanjutan dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat							
Tujuan 2 (RPJMD) : Terwujudnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah							

Sasaran Strategis Level 2 (RPJMD) : Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah					Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)		
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura				Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
					Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		
			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Misi II : Meningkatkan produksi pertanian melalui akses sarana produksi
				Meningkatnya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	

						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Meningkatnya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
						Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
						Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
						Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	
						Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	
			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana Pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Meningkatnya Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian TPH yang difasilitasi	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	

						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
						Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Hortikultura	
						Sub Kegiatan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara Numerik dan Spasial di Tingkat Provinsi	
						Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tingkat Provinsi	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Tingkat Provinsi	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase penanganan bencana pertanian dan DPI terhadap pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Meningkatnya Pelindungan Tanaman	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	

					Bencana Pertanian TPH yang difasilitasi	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
						Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
						Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
						Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan dan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk	Program Penyuluhan Pertanian	
				Meningkatnya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
						Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	
						Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	
				Meningkatnya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan penyuluhan pertanian yang difasilitasi	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
						Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	

				Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani berbasis kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis kwsn	
						Sub Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Korporasi Petani	
						Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
						Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	
						Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	
MISI III : Mewujudkan Keterkaitan (Nexus) yang kuat antara Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim							Crosscutting dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyediaan Pangan (Komoditi Tanaman Pangan) di level sasaran renstra dinas
Tujuan 3 (RPJMD) : Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air							

Sasaran Strategis Level 2 (RPJMD) : Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi dan Air					Indeks Ketahanan Pangan		
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan				Indeks Ketersediaan Pangan		
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
						Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Program Misi III : Menjamin Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Pupuk, Pestisida Obat-Obatan Pertanian yang langsung ke petani
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Program Misi III : Mendorong industrialisasi di sektor pertanian untuk menghasilkan produk bernilai tinggi
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
						Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
						Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Program Misi III : Melanjutkan GSMP berbasis pemberdayaan masyarakat

						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
						Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Program Misi III : Mendorong industrailisasi di sektor pertanian untuk menghasilkan produk bernilai tinggi
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
						Program Penyuluhan Pertanian	
						Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
						Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Program Misi III : Meningkatkan kualitas penyuluh pertanian
						Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	
						Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Program Misi III : Meningkatkan kualitas penyuluh pertanian
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

			Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah		Persentase Dokumen PEP yang tersusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
						SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	
						Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	

						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	
						Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	

						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tujuan Strategis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dengan penerapan teknologi spesifik lokasi;
2. Meningkatkan luas panen dengan penerapan teknologi spesifik lokasi;
3. Meningkatkan luas tanam tanaman hortikultura unggulan pada kawasan;
4. Meningkatkan produktivitas;
5. Meningkatkan mutu pengolahan hasil;
6. Memperluas pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Dengan memperhatikan visi, misi yang terdapat pada RPJMD serta mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan maka hasil telaah ditetapkan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa indikator yang mengukurnya. Target dari indikator sasaran tersebut mengalami perubahan di Tahun 2022 dan 2023.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan persentase sasaran/target Renstra Dinas dan realisasi terdapat beberapa indikator sasaran yang belum tercapai dan ada juga melebihi target. Adapun rinciannya sebagai berikut:

l. Indikator sasaran yang belum tercapai:

- a. Realisasi produksi padi pada tahun 2023 lebih kecil 71,84% dari target.
- b. Realisasi produksi jagung pada tahun 2023 lebih kecil 85,83% dari target.
- c. Realisasi produksi kedelai pada tahun 2023 lebih kecil 1,68% dari target.
- d. Realisasi produksi jeruk pada tahun 2023 lebih kecil 80,27% dari target.

- e. Realisasi produksi duku pada tahun 2023 lebih kecil 69,27% dari target.
- f. Realisasi produksi cabai pada tahun 2023 lebih kecil 62,83% dari target.
- g. Realisasi produktivitas jagung pada tahun 2023 lebih kecil 95,78% dari target.
- h. Realisasi produktivitas jeruk pada tahun 2023 lebih kecil 7,01% dari target.
- i. Realisasi produktivitas durian pada tahun 2023 lebih kecil 14,32% dari target.
- j. Realisasi produktivitas duku pada tahun 2023 lebih kecil 94,54% dari target.
- k. Realisasi produktivitas nanas pada tahun 2023 lebih kecil 62,70% dari target.
- l. Realisasi produktivitas cabai pada tahun 2023 lebih kecil 9,04% dari target.
- m. Realisasi produktivitas bawang merah pada tahun 2023 lebih kecil 12,90% dari target.

II. Indikator sasaran yang melebihi target:

- a. Realisasi produksi durian pada tahun 2023 lebih besar 130,52% dari target.
- b. Realisasi produksi nanas pada tahun 2023 lebih besar 244,93% dari target.
- c. Realisasi produksi tanaman obat pada tahun 2023 lebih besar 203,65% dari target.
- d. Realisasi produksi bawang merah pada tahun 2023 lebih besar 168,59% dari target.
- e. Realisasi produktivitas padi pada tahun 2023 lebih besar 110,7% dari target.
- f. Realisasi produktivitas kedelai pada tahun 2023 lebih besar 118,34% dari target.
- g. Realisasi produktivitas jeruk siam pada tahun 2022 lebih besar 3,04% dari target.

Untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 akan melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan;
3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura;
4. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian;
7. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian;
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
9. Program Penyuluh Pertanian.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai basis atau landasan pembangunan ekonomi. Sektor ini memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB Sumatera Selatan. Sektor ini termasuk ke dalam tiga sektor terbesar yang menyokong PDRB setelah sektor pertambangan dan energi, serta sektor industri pengolahan. Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap kesempatan kerja karena merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Pelayanan di bidang Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Selatan perlu didasarkan pada peningkatan keterampilan dan keahlian petani, pengembangan sistem data dasar dan informasi yang akurat dan lengkap, penyediaan prasarana dan sarana produksi, peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan swasta, penguatan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Potensi besar khususnya di sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta penetapan program prioritas pusat yang menjadi tantangan terdapat beberapa permasalahan dalam mempertahankan perannya sebagai lumbung pangan, antara lain :

✓ **Rendahnya Indeks Pertanaman Tanaman Padi**

Indeks Pertanaman Tanaman Padi di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah antara 1,11-1,17 kurun waktu 2021-2024, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel II.5. Indeks Pertanaman Tanaman Padi di Sumatera Selatan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pertanaman (IP)			
		2021	2022	2023	2024
1	Muara Enim	0.89	0.92	0.87	0.95
2	Musi Rawas	1.61	1.42	1.48	1.57
3	Empat Lawang	1.21	0.98	1.17	1.02
4	Pagar Alam	0.97	1.06	1.28	1.31
5	Lubuk Linggau	1.65	1.19	1.23	1.55
6	OKU Timur	1.69	1.91	1.89	1.97
7	OKU	0.75	0.82	0.81	0.74
8	Muratara	1.36	1.37	1.25	1.24
9	Banyuasin	1.12	1.07	1.07	1.12
10	OKU Selatan	1.13	1.03	1.16	1.12
11	Musi Banyuasin	0.96	0.90	0.81	0.76
12	Ogan Ilir	0.63	0.72	0.74	0.70
13	Prabumulih	0.14	0.14	0.13	0.18
14	OKI	0.92	1.06	0.97	1.06
15	Palembang	0.76	0.73	0.96	0.82
16	Pali	1.11	1.52	1.65	1.75
17	Lahat	1.15	1.21	1.13	1.05
Jumlah		1.11	1.15	1.13	1.17

✓ **Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian**

Adanya indikasi lahan pertanian semakin berkurang di Provinsi Sumatera Selatan akibat kecenderungan konversi lahan pertanian pangan untuk industri, perkebunan, dan permukiman.

Tabel II.6. Luas Baku Sawah, LP2B dan IP Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	LBS (Ha)	LP2B (Ha)*	Selisih LBS dan LP2B (Ha)
1	Muara Enim	19,527	16,512.54	3,014.46
2	Musi Rawas	14,969	21,635.92	(6,666.92)
3	Empat Lawang	9,432	11,562.00	(2,130.00)
4	Pagar Alam	3,088	1,392.66	1,695.34
5	Lubuk Linggau	1,129	857.19	271.81
6	OKU Timur	66,624	52,285.84	14,338.16
7	OKU	3,561	-	-
8	Muratara	2,201	3,296.29	(1,095.29)
9	Banyuasin	189,345	104,973.00	84,372.00
10	OKU Selatan	8,821	6,521.00	2,300.00
11	Musi Banyuasin	38,051	33,809.66	4,241.34
12	Ogan Ilir	34,787	30,934.55	3,852.45
13	Prabumulih	165	94.71	70.29
14	OKI	105,436	75,424.28	30,011.72
15	Palembang	3,295	1,014.17	2,280.83
16	Pali	6,399	3,619.00	2,780.00
17	Lahat	12,652	12,000.00	652.00
Jumlah		519,482.00	375,932.81	143,549.20

*) Data per tanggal 06 Oktober 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, masih banyak kabupaten/ kota yang belum melakukan pengesahan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui peraturan daerah/ peraturan bupati. Hal ini cenderung membuka peluang untuk terjadinya konversi lahan (alih fungsi lahan) dari lahan pertanian pangan ke sektor lain.

- ✓ **Lahan Sawah belum termanfaatkan secara optimal**
Terlantarnya lahan sawah karena pengairan tidak berfungsi dengan baik.
- ✓ **Serangan Hama dan Penyakit**
Hama seperti wereng, tikus, dan keong mas sering menyebabkan gagal panen.
- ✓ **Ketergantungan pada Curah Hujan**
Sistem irigasi belum optimal, sehingga petani kesulitan saat musim kemarau ataupun saat curah hujan tinggi. cuaca dan iklim

juga sangat mempengaruhi kondisi sawah, jika curah hujan tinggi maka akan terjadi kemunduran jadwal tanam begitu juga jika terjadi kekeringan. Sebagaimana tabel di atas yang menunjukkan terjadi peningkatan luas serangan area yang terdampak iklim. Hal ini tetap menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan ini.

✓ **Dampak Perubahan Iklim**

Cuaca ekstrem, seperti banjir dan kekeringan, mempengaruhi produksi pangan.

✓ **Fluktuasi Harga dan Tengkulak**

Harga hasil pertanian yang tidak stabil dan petani sering bergantung pada tengkulak. Di Tahun 2025 telah dibentuk Tim yang terdiri dari beberapa OPD Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan sebesar Rp. 6.500 per kilogram. Hal ini bertujuan untuk melindungi petani dan memastikan stabilitas pasokan beras. Permasalahan ini akan menjadi perhatian untuk ke depannya dan tim yang sudah dibentuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

✓ **Kurangnya Regenerasi Petani Muda**

Generasi muda kurang tertarik di sektor pertanian, mengancam keberlanjutan produksi pangan.

✓ **Ketimpangan Akses Petani Kecil terhadap Program**

Petani kecil yang tidak terdaftar di dalam aplikasi Simultan yang menjadi dasar dalam pemberian bantuan pemerintah

✓ **Rendahnya Penggunaan Teknologi**

Banyak petani masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien.

Selain permasalahan yang terjadi dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, permasalahan di Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian juga menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. SDM Pertanian dalam hal ini petani, kelompok tani dan petugas/ lembaga pertanian (PPL, POPT dan PBT). Permasalahan dari sisi petani/ kelompok tani berupa kurangnya kemampuan petani/ kelompok tani dalam menerapkan teknologi

budidaya dan pasca panen. Sedangkan permasalahan dari sisi petugas/lembaga pertanian berupa rendahnya kapasitas kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian terkait dengan belum seluruh kelembagaan penyuluhan (BPP) diklasifikasikan.

Perumusan isu strategis dalam KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan mengelompokkan isu dan disintesa menyesuaikan dengan kondisional secara faktual terhadap apa yang terjadi di Sumatera Selatan. Isu strategis didapatkan dengan menggunakan metode *cross-cutting* antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan kinerja capaian TPB; Isu Strategis RPJPD 2025-2045; Isu strategis RPD 2024-2026; Isu KLHS RTRW Provinsi Sumatera dan Isu Masukan Pokja dan Peserta Konsultasi Publik. Berdasarkan Hasil *cross-cutting* tersebut didapatkan ranking setiap pasangan *cross-cutting*. Selanjutnya adalah proses penjumlahan ranking *cross-cutting* sehingga didapatkan Hasil TPB prioritas (Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2024).

Selain itu beberapa yang menjadi isu global, nasional dan regional menjadi hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan rencana strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan. Isu global saat ini berupa Krisis Pangan Global Saat Iklim Ekstrim; kemudian Isu Nasional berupa Alih Fungsi Lahan Pertanian, Perubahan Iklim Ekstrim, Petani didominasi Umur Tua, Kualitas SDM masih rendah, dan Jumlah Penyuluh Terbatas, serta Isu Regional berupa Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan belum optimal, Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir dan Tanah Longsor belum optimal, serta Kemiskinan yang masih tinggi. Isu-isu tersebut dapat ditarik menjadi isu-isu yang akan diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Adapun rincian review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 disajikan pada Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	7		8
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)		100	49.455.205.825	49.455.205.825	-	
	3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Tahunan (dok)		6	2.325.000.000	2.325.000.000		
	3.27.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	Palembang	3	1.775.000.000	1.775.000.000		PAD
	3.27.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	17 kab/kota	3	550.000.000	550.000.000		PAD
	3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100	41.363.838.000	41.378.203.000	14.365.000	
	3.27.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (org)	Palembang	325	38.144.698.000	38.144.698.000		DAU
	3.27.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	Palembang 4 UPTD	5	3.219.140.000	3.233.505.000	14.365.000	PAD
	3.27.01.1.03	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)		100	175.000.000	175.000.000		
	3.27.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD (dok)	Palembang	1	75.000.000	75.000.000		PAD
	3.27.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah (laporan)	17 kab/kota	1	100.000.000	100.000.000		PAD
	3.27.01.1.05	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100.000.000	100.000.000		

			Persentase Ketaatan terhadap aturan kepegawaian (%)		100				
			Persentase pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya (%)		100				
	3.27.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Palembang	10	100.000.000	100.000.000		PAD
	3.27.01.1.06	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)		100	3.316.367.825	3.302.002.825	(14.365.000)	
	3.27.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Palembang 4 UPTD	1	50.000.000	50.000.000		PAD
	3.27.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Palembang	1	670.927.825	670.927.825		PAD
	3.27.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	Palembang	2	200.000.000	200.000.000		PAD
	3.27.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	Palembang		50.000.000	50.000.000		PAD
	3.27.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	Palembang	1	55.000.000	55.000.000		PAD
	3.27.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (laporan)	17 kab/kota	2	1.290.440.000	1.276.075.000	(14.365.000)	PAD
	3.27.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen)	Palembang	1	1.000.000.000	1.000.000.000		PAD
	3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)		100	965.000.000	965.000.000		
	3.27.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	Palembang	1	5.000.000	5.000.000		PAD
	3.27.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang disediakan (laporan)	Palembang 4 UPTD	1	960.000.000	960.000.000		PAD

	3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)		100	1.210.000.000	1.210.000.000		PAD
	3.27.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	Palembang 4 UPTD	253	900.000.000	900.000.000		PAD
	3.27.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Palembang 4 UPTD	135	160.000.000	160.000.000		PAD
	3.27.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	Martapura	2	150.000.000	150.000.000		PAD
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura :	17 kab/kota		14.154.500.000	14.154.500.000	-	PAD
			- Padi (Ha)		10.000				
			- Jagung (Ha)		5.000				
			- Cabe (Ha)		6				
			- Bawang Merah (Ha)		6				
			- Jeruk (Ha)		20				
			- Nanas (Ha)		5				
	3.27.02.1.01	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Peredaran Sarana TPH yang difasilitasi (dok)	17 kab/kota	5	10.709.400.400	10.709.400.400		PAD
	3.27.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (laporan)	17 kab/kota	4	10.709.400.400	10.709.400.400		PAD
	3.27.02.1.02	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan peredaran benih TPH yang difasilitasi (dok)			3.445.099.600	3.445.099.600		
	3.27.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih (sertifikat)	17 kab/kota	16	500.000.000	500.000.000		
	3.27.02.1.02.05	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit hortikultura (laporan)	17 kab/kota	3	2.945.099.600	2.945.099.600		PAD

	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam :			2.600.000.000	2.600.000.000	-	
			- Padi (Ha)		100				
	3.27.03.1.01	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian TPH yang difasilitasi (unit)		4	2.600.000.000	2.600.000.000		
	3.27.03.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani (dok)	BA	1	2.300.000.000	2.300.000.000		PAD
	3.27.03.1.01.10	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (unit)	3 UPTD lingkup Dinas Pertanian TPH	3	300.000.000	300.000.000		PAD
	3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi :			700.000.000	700.000.000	-	
			- Tanaman Pangan (Ha)	17 kab/kota	520				
			- Hortikultura (Ha)	17 kab/kota	97				
	3.27.05.1.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian TPH yang difasilitasi (kali)		220	700.000.000	700.000.000		PAD
	3.27.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (ha)	17 kab/kota	2.500	500.000.000	500.000.000		PAD
	3.27.05.1.01.02	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (ha)	17 kab/kota	400	200.000.000	200.000.000		
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				34.700.000.000	34.700.000.000	-	
			Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya (unit)	17 kab/kota	34				
			Jumlah Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)	17 kab/kota	1.400				
			Jumlah kemitraan usaha tani (unit)	17 kab/kota	20				

	3.27.07.1.01	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)		45	250.000.000	250.000.000		
	3.27.07.1.01.04	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (org)	Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian (OKU Timur) dan Palembang	45	250.000.000	250.000.000		PAD
	3.27.07.1.02	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (dok)		2	34.250.000.000	34.250.000.000		
	3.27.07.1.02.01	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (dokumen)	BP3 Martapura (OKU Timur)	1	250.000.000	250.000.000		PAD
	3.27.07.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (kelompok)	17 kab/kota	1.400	34.000.000.000	34.000.000.000		PAD
	3.27.07.1.03	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)		20	200.000.000	200.000.000		PAD
	3.27.07.1.03.01	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (unit)	Palembang	20	200.000.000	200.000.000		PAD
Jumlah						101.609.705.825	101.609.705.825	-	

Palembang,

2025

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP 196703151990031004

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pertanian dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Perubahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra 2025-2029 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dilaksanakan melalui identifikasi program dan kegiatan di 17 kabupaten/kota yang selanjutnya dibahas pada rapat teknis ditingkat provinsi yang dihadiri oleh Dinas Pertanian lingkup tanaman pangan dan BAPPEDA Kabupaten/Kota serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Anggota Dewan pada saat reses. Usulan masyarakat tersebut setelah dibahas pada rapat teknis dan pada Musrenbang Tingkat Provinsi dan Musrenbangnas maka bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa bantuan benih, pupuk dan pestisida, pengadaan sarana prasarana alat dan mesin pertanian. Usulan masyarakat tersebut sebagian besar terkait dengan

isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yaitu yang berkaitan dengan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan komoditas strategis (padi, jagung dan kedelai), serta komoditas pangan lainnya berupa tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung **Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut **Asta Cita** yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi. Ada juga soal pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif.

Pada **Asta Cita kedua**, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program *food estate*, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas

pangan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.

Untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 akan melaksanakan beberapa program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan.
3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura.
4. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.
7. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian.

Dari beberapa potensi, permasalahan dan isu strategis yang tercantum dalam dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, serta isu global, nasional dan regional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis di Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tabel III.1 di bawah ini:

III.1 Isu-isu strategis di Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Lahan Rawa Mineral Sumsel terluas se Indonesia (2,1 juta ha yang terdiri dari 0,885 juta ha rawa pasang surut dan 1,246 juta ha rawa lebak)	1. Rendahnya Indeks Pertanaman Tanaman Padi 2. Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian 3. Lahan Sawah belum termanfaatkan secara optimal 4. Serangan Hama dan Penyakit 5. Ketergantungan pada Curah Hujan 6. Dampak Perubahan Iklim 7. Fluktuasi Harga dan Tengkulak 8. Kurangnya Regenerasi Petani Muda 9. Ketimpangan akses petani kecil terhadap program pemerintah. 10.Rendahnya Penggunaan Teknologi oleh Petani	1. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting Alih Fungsi Lahan dan Gambut 2. Kerentanan Ketahanan Pangan 3. Alih Fungsi Lahan dan Gambut 4. Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Krisis Pangan Global Saat Iklim Ekstrem	1.Alih Fungsi Lahan Pertanian 2.Perubahan Iklim Ekstrim 3.Petani Didominasi Umur Tua 4.Kualitas SDM Masih Rendah 5.Jumlah Penyuluh Terbatas	1. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal 2. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan lahan, Banjir dan Tanah Longsor Belum Optimal 3. Kemiskinan yang masih tinggi	1. Kerentanan Ketahanan Pangan (Stabilitas Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Hilirisasi Pertanian TPH) 2. Belum Optimalnya Mitigasi Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 3. Alih Fungsi Lahan Pertanian 4. Rendahnya kapasitas penyuluhan pertanian 5. Pemenuhan 1 Desa 1 Penyuluh (Keberadaan PPEP di Provinsi Sumsel)

Sedangkan target dan langkah strategis Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun 2025 adalah:

- Meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, aneka cabai, bawang merah, kopi, kakao, tebu, kelapa, daging sapi/kerbau, dan daging ayam
- Memperkuat cetak sawah, optimalisasi lahan, dan dukungan sarana-prasarana produksi
- Meningkatkan produksi susu dan daging sapi

- Menyiapkan benih unggul
- Menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen
- Menyediakan pupuk bersubsidi
- Mengembangkan pertanian moden melalui pertanian milenial

Ada 5 (lima) strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, serta pengembangan pertanian modern, dan gerakan tiga kali ekspor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2030.

Arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2030, yaitu pada Tabel III.2 dibawah ini :

Tabel III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2030 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1. Permentan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian 2. Permentan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 3. Kepmentan RI Nomor 02/Kpts/RC.040/M/01/2025 tentang Kawasan Pertanian Nasional 4. Pasal 46 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa	Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Strategi Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta Meningkatkan Akses Permodalan dan Sarana Pertanian	1. Stabilitas Produksi TPH melalui : Peningkatan Produksi TPH dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian TPH; Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP); Pengembangan Infrastruktur Irigasi (Optimasi Lahan) dan Perluasan Lahan Sawah; Identifikasi Jumlah dan Varietas Sayur dan Buah Unggulan/Strategis Sumsel) 2. Pengembangan Food Estate/ KSPP Berbasis Korporasi 3. Pemenuhan Ketentuan 1 Desa 1 Penyuluh (Penyuluh Laki-Laki dan Perempuan) 4. Penguatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian 5. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 6. Pemberdayaan dan Pelatihan Petani termasuk wanita tani dalam berusaha tani.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran, kendala, tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Adapun sasaran-sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2030 dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi II : Mewujudkan Ketahanan Ekonomi berbasis Sumber Daya Lokal dan Berkelanjutan dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tujuan 2 (RPJMD) : Terwujudnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah Sasaran Strategis Level 2 (RPJMD) : Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura		Nilai Tukar Petani :							
			- Sub Sektor Tanaman Pangan	100,24	100,50	100,50	101,00	101,00	101,05	101,05
			- Sub Sektor Tanaman Hortikultura	91,42	100,00	100,05	100,10	100,15	100,20	100,25
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :							
			- Padi (%)	2,71	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			- Jagung (%)	0,86	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura :							
			- Cabai Besar (%)	15,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektora Provinsi	A	A	A	A	A	A	A

Sedangkan untuk pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di *sector* pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sumatera Selatan. Sektor pertanian ini termasuk ke dalam tiga sektor terbesar yang menyokong PDRB setelah sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap kesempatan kerja. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, perkembangan sektor pertanian ke depan harus lebih di tingkatkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun dan Bersifat Indikatif sesuai dengan peran dan tupoksi dinas untuk mendukung visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2029.

Agenda utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mendukung visi dan misi Gubernur terpilih diantaranya adalah :

1. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

b. Pencapaian SDGs

SDGs singkatan dari *Sustainable Development Goals* adalah program pembangunan berkelanjutan yang disusun negara-negara anggota PBB pada 2015 dan diharapkan tercapai pada tahun 2030. SDGs dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisi 17 tujuan yang ingin dicapai untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan.

Ke-17 tujuan SDGs di atas saling keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk mencapai tujuan SDGs, dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama. SDGs ini menjadi komitmen global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih baik lagi. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan SDGs. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan dan tindakan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.

Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berada pada Tujuan ke 2 yaitu : Tanpa Kelaparan dengan sasaran mengakhiri kelaparan, menacapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kelaparan disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan kronis. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat yang menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Target yang akan dicapai pada tahun 2030 pada point 2.3 yaitu menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian dengan indikator SDGs nya adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Sejak Januari 2008, indeks harga yang diterima (IT) dan indeks harga yang dibayar petani (IB) serta NTP menggunakan tahun dasar 2007 dengan cakupan sebanyak 32 provinsi serta penyajian data untuk masing-masing sub sektor, sebelumnya indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar

petani serta NTP menggunakan tahun dasar 1993 dengan cakupan provinsi sebanyak 23 provinsi

Data perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

- Indeks harga yang dibayar petani (IB) disusun berdasarkan data hasil survei bulanan statistik harga konsumen di pasar pedesaan yang dilaksanakan setiap bulan
- Indeks harga yang diterima petani (IT) bersumber dari hasil survei harga di tingkat produsen (farm gate) yang dilaksanakan setiap bulan
- IT dan IB tersebut dihitung dengan menggunakan formula Laspeyres yang dikembangkan
- NTP merupakan rasio antara IT dengan IB yang dinyatakan dalam persentase.

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. NTP merupakan perbandingan indeks harga komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani (It) terhadap indeks harga barang/ jasa yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di daerah pedesaan.

c. Pengentasan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 hingga 2025 (bulan Maret) baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di Tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 12,66% dan menurun di tahun 2025 (bulan Maret) menjadi 10,15% berdasarkan Data BPS Sumatera Selatan. Jika dilihat dari kategori perkotaan dan pedesaan, persentase penduduk miskin di pedesaan (10, 79%) lebih besar dibandingkan dengan perkotaan (9,10%).

Permasalahan kemiskinan di perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian mengindikasikan rendahnya produktivitas yang dihasilkan dari lapangan usaha sektor pertanian, yang disebabkan oleh rendahnya kepemilikan lahan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta kurangnya modal usaha tani. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan, antara lain: Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, Meningkatnya jumlah pengangguran, Pendidikan yang rendah, Terjadi bencana alam, Distribusi pendapatan yang tidak merata.

Strategi Sektor Pertanian dalam upaya penurunan angka kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan cara peningkatan produksi dan produktivitas komoditi hortikultura melalui program dan kegiatan yaitu Perbaikan Luas Baku Sawah (LBS), Dukungan di Lokasi Kerangka Sampel Area (KSA), Kegiatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate), Optimalisasi Petugas Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP), Perbaikan Data SIMLUHTAN dan Serapan KUR. Selain itu melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dengan adanya dukungan PPEP Pertanian sebanyak 1.400 orang. Sasaran GSMP ini adalah RTM 12 persentil pada data DTKS. Persentil 12 ke atas ini masyarakat miskin dan hampir miskin, harus dijaga agar tidak jatuh miskin atau bertambah dalam dan parah kemiskinannya. Konsep **Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)** yaitu Kondisi Masyarakat yang Mempunyai KEMAMPUAN untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi KELUARGA melalui pengembangan KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI dan KONSUMSI pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara BERKELANJUTAN melalui Perubahan Pola Pikir dari KONSUMEN menjadi PRODUSEN (Herman Deru, 2021). Diharapkan dengan adanya gerakan GSMP ini dapat menurunkan angka kemiskinan di 17 Kab/Kota Se-

Sumatera Selatan dan keluarga mandiri pangan dalam pemenuhan gizi keluarga.

4.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan kegiatan serta anggaran prioritas untuk pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 yaitu adalah Rp. 118.329.350.730,- yang terdiri dari 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Adapun rincian program dan kegiatan melalui dana APBD adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan dana sebesar Rp. 53.709.807.200,-

Kegiatan:

- 1) **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, target Laporan Kinerja Tahunan (dok) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 870.864.200,-
- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, target Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 43.631.383.000,-
- 3) **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 127.800.000,-
- 4) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, target Persentase Pegawai yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 102.340.000,-
- 5) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 3.794.420.000,-

- 6) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 1.615.000.000,-
- 7) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 3.568.000.000,-

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan dana sebesar Rp. 34.658.160.830,-

Kegiatan:

- 1) **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**, target Jumlah Pengawasan Peredaran Sarana TPH yang difasilitasi (dok) dengan dana sebesar Rp. 29.481.811.595,-
- 2) **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**, target Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih TPH yang Difasilitasi (dok) dengan dana sebesar Rp. 5.176.349.235,-

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan dana sebesar Rp. 1.339.804.300,-

Kegiatan:

- 1) **Penataan Sarana Pertanian**, target Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang difasilitasi (dok) dengan dana sebesar Rp. 1.339.804.300,-

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan dana sebesar Rp. 643.720.000,-

Kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi,** target Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang difasilitasi (Dok) serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Difasilitasi (Dok) dengan dana sebesar Rp. 643.720.000,-

5. Program Penyuluhan Pertanian dengan dana sebesar Rp. 27.977.858.400,-

Kegiatan :

- 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian,** target Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi (Dok) dengan dana sebesar Rp. 737.845.000,-
- 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian,** target Jumlah Penerapan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi (Dok) dengan dana sebesar Rp. 26.486.317.000,-
- 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan,** target Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang Difasilitasi (Dok) dengan dana sebesar Rp. 753.696.400,-

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Serta dapat memberikan pedoman dan arahan bagi *stakeholder* pembangunan pertanian untuk lebih mudah berperan aktif dalam pembangunan. Lebih dari itu dengan adanya Dokumen Renja Perubahan ini akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan merupakan dasar evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas

bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran program serta kegiatan Dinas Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan harapan terjaminnya kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan di bidang pertanian. Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi arah dan langkah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu satu tahun ke depan di tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan memerlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

[illegible]

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						290 Orang/ Bulan	418 Orang/ Bulan	41.034.468.000,00	41.034.468.000,00	42.632.218.000,00	1.597.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas					43.303.890.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						5 Dokumen	5 Dokumen	3.172.940.000,00	3.172.940.000,00	2.601.181.000,00	-571.759.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas					3.219.140.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-	-	175.000.000,00	175.000.000,00	127.800.000,00	-47.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	Dinas Pertanian TPH				175.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																						
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas					75.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																						
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	52.800.000,00	-47.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas					100.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-					-	-	468.127.825,00	146.200.000,00	102.340.000,00	-365.787.825,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	Dinas Pertanian TPH dan 4 UPTD				350.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	

[illegible]

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	230.000.000,00	191.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas				200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.01.1.06.0006			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas				50.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas				55.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.290.440.000,00	1.290.440.000,00	865.320.000,00	-425.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas				1.290.440.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	1.500.000.000,00	750.000.000,00	150.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas				1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	Dinas Pertanian TPH			1.359.500.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	Dinas Pertanian TPH			1.359.500.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	1.605.000.000,00	1.675.000.000,00	1.675.000.000,00	70.000.000,00						Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	Dinas Pertanian TPH dan 4 UPTD			965.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00						Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	Dinas Pertanian TPH dan 4 UPTD			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1.600.000.000,00	1.670.000.000,00	1.670.000.000,00	70.000.000,00						Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	Dinas Pertanian TPH dan 4 UPTD			960.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	1.660.000.000,00	3.025.000.000,00	2.938.000.000,00	1.078.000.000,00						Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	Dinas Pertanian TPH dan 4 UPTD			1.660.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	Dinas Pertanian TPH dan 4 UPTD			-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

[illegible]

		Jumlah pengawasan ketahanan dan sebaran sarana pengalihan hasil tanaman pangan						1 laporan	1 laporan		200.000.000,00	200.000.000,00	176.025.000,00	23.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanian keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas						0,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penderaan Benih Tanaman	-						-	-		3.745.099.600,00	7.745.099.600,00	5.176.349.235,00	1.431.249.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanian keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	Produsen dan Petani Penghasil Benih: BBH Padi Unggul dan Betilang, BBH Jarak dan Sijarana				5.206.530.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih						16 Sertifikat	22 Sertifikat		500.000.000,00	4.500.000.000,00	3.435.445.000,00	2.636.445.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanian keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas				666.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Penderaan Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, teraudit dan berlabel yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 hepat yaitu label jenis-varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga						3 laporan	4 laporan		3.245.099.600,00	3.245.099.600,00	1.740.904.235,00	-1.504.195.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanian keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas				4.540.530.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-						-	-		671.800.000,00	3.790.358.000,00	1.728.654.300,00	3.628.200.000,00									4.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-						-	-		671.800.000,00	3.790.358.000,00	1.728.654.300,00	1.056.854.300,00			Memantapkan sistem pertanian keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas				4.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani						1 Dokumen	2 Dokumen		371.800.000,00	1.371.800.000,00	1.122.654.300,00	750.854.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanian keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas				4.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		

[illegible]

[illegible]

			Jumlah korporasi petani yang didampingi				7 Unit	7 Unit	435.000.000,00	735.000.000,00	578.902.000,00	143.902.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berbeda sang melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berbeda sang melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas				0,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																					
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	174.794.400,00	74.794.400,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berbeda sang melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berbeda sang melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas				300.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
J U M L A H																					
									123.283.777.825,00	130.902.335.825,00	118.329.380.730,00	-4.964.427.095,00					132.768.900.400,00				